

ABSTRAK

Tidak adanya kepastian hukum atas ketidakadilan yang menimpa pemain terkait pembayaran gaji yang hanya sebagian dan tidak sesuai dengan kesepakatan awal perjanjian. Oleh karena itu, tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui kejelasan mengenai Surat Keputusan Nomor SKEP/69/XI/2020 sebagai pemotongan gaji pemain sepak bola liga Indonesia, dan untuk mengetahui terkait Langkah yang ditempuh dalam upaya perlindungan hukum terkait pembayaran gaji pemain di masa pandemi covid-19. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Surat Keputusan PSSI Nomor SKEP/69/XI/2020 tidak dapat dijadikan alasan pemotongan gaji pemain sepakbola hal tersebut terdapat pertentangan terhadap regulasi FIFA Circular No. 1714 COVID-19 Football Regulatory Issues atas referensi dari WHO mengenai pandemi COVID-19 terkait isi kontrak penggajian sepakbola harus disepakati oleh semua pihak agar dapat diambil keputusan yang objektif dan adil bagi semua pihak. Sedangkan dalam hal pemutusan pemangkasan gaji pemain di Indonesia sendiri di putuskan sepihak oleh PSSI tanpa mengindahkan hak-hak dan aspirasi pemain selaku pekerja dalam sepakbola. Disamping itu keputusan tersebut dinilai melanggar hak-hak pekerja sesuai yang termaktub dalam UU Ketenagakerjaan.

Hukum belum memberikan kepastian terkait perlindungan hak pemain dalam aspek penggajian di masa pandemi ini mengingat hingga saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah untuk menangani terkait penggajian tersebut. Namun jika didasarkan pada UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya hal tersebut melanggar hak pekerja, dan bilamana terjadi sengketa terkait olahraga maka diputuskan berdasar substansi Pasal 88 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni dapat ditempuh dengan jalan musyawarah mufakat oleh induk organisasi cabang olahraga yakni PSSI, Arbitrase, dan Peradilan.

Kata Kunci : Hak Gaji, Pemain Sepak Bola Liga Indonesia, Perlindungan Hukum.

ABSTRACT

The absence of legal certainty over the injustices that befell the players regarding the payment of salaries that are only partially and not in accordance with the initial agreement of the agreement. Therefore, the purpose of writing this thesis is to find out the clarity regarding the Decree Number SKEP/69/XI/2020 as a salary deduction for Indonesian league football players, and to find out about the steps taken in legal protection efforts related to payment of player salaries during the pandemic. covid-19. This research method uses normative legal research using a statute approach.

The results of this study indicate that the PSSI Decree Number SKEP/69/XI/2020 cannot be used as a reason for cutting the salaries of football players. 1714 COVID-19 Football Regulatory Issues on reference from WHO regarding the COVID-19 pandemic related to the contents of the football salary contract must be agreed upon by all parties so that an objective and fair decision can be made for all parties. Meanwhile, in terms of the decision to cut player salaries in Indonesia itself, PSSI decided unilaterally without heeding the rights and aspirations of players as workers in football. In addition, the decision is considered to violate the rights of workers in accordance with the Manpower Act.

The law has not provided certainty regarding the protection of players' rights in the aspect of payroll during this pandemic considering that until now there has been no follow-up from the government to deal with the payroll. However, if it is based on Law Number 13 of 2003 concerning Manpower, it should violate the rights of workers, and if there is a dispute related to sports, it is decided based on the substance of Article 88 of Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System, which can be reached by way of deliberation and consensus. by the parent organization of sports, namely PSSI, Arbitration, and Judiciary.

Keywords: Salary Rights, Indonesian League Soccer Players, Legal Protection.